

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kapasitas produksi dalam pencapaian total output yang lebih besar sehingga tercapai kesejahteraan yang tinggi bagi seluruh rakyat. Pembangunan sebagai tuntutan kepada masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena semakin bertambahnya penduduk maka akan bertambah pula jumlah, jenis, dan kualitas kebutuhannya seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (Karianti, 2015). Semakin berkembangnya manusia dan IPTEK, semakin berkembang pula kebutuhan manusia dan mendesak untuk dipenuhi. Oleh karena itu, pembangunan gencar dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi beban dunia usaha. Prioritas pertama, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan kemudahan dan fasilitas sehingga usaha tetap dapat berjalan baik, prioritas kedua yaitu peningkatan pada pembangunan proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sebagai pengentasan gelombang pengangguran, meliputi jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, energi, perumahan dan perhubungan (Prasetyo & Firdaus, 2009). Selain menyerap tenaga kerja, akan tetapi adanya proyek infrastruktur juga dapat menggerakkan perekonomian.

Salah satu indikator dalam kemajuan suatu wilayah adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka suatu wilayah semakin maju pula. Menurut Sukma (2015) salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur. Infrastruktur sebagai roda penggerak dari pertumbuhan ekonomi maka dapat dianggap sebagai lokomotif pada pembangunan daerah dan nasional. Semakin baik infrastruktur di suatu daerah, maka pengaruhnya semakin baik pula terhadap keadaan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Laksito dalam Sukma (2015) berdasarkan perspektif ekonomi, infrastruktur tercakup pada tujuh kategori yaitu:

1. Infrastruktur pertanian seperti irigasi dan bendungan.
2. Infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, terminal dan bandara.
3. Infrastruktur ekonomi, yang meliputi bank, *mall*, pasar dan pertokoan.
4. Infrastruktur energi yaitu pembangkit dan jaringan listrik serta POM bensin.
5. Infrastruktur kesehatan meliputi balai pengobatan, puskesmas dan rumah sakit.
6. Infrastruktur telekomunikasi seperti STO (Sentral Telepon Otomat), BTS (*Base Transceiver Station*), dan jaringan telepon.
7. Infrastruktur sosial seperti pelayanan masyarakat, balai pertemuan dan tempat ibadah.

Pada pembangunan infrastruktur transportasi, transportasi merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai urat nadi perkembangan dan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi serta mobilitas penduduk yang tumbuh secara bersama, mengikuti perkembangan dalam berbagai sektor dan bidang (Kadir,

2006). Kemajuan pembangunan di segala bidang juga dibarengi kemajuan transportasi untuk mendukung kemajuan tersebut. Pembangunan dan perbaikan di bidang transportasi menjadikan berbagai kebutuhan manusia akan lebih praktis karena transportasi umum memang diperlukan setiap manusia di suatu negara.

Salah satu infrastruktur yang mempunyai peran besar terhadap pembangunan dan pengembangan ruang, baik lingkup wilayah maupun negara adalah infrastruktur transportasi, karena mampu menciptakan ekonomi masyarakat dan mobilitas sosial (manusia dan barang), serta mampu menghubungkan hasil dari produksi ke pasar sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya perdagangan antar negara, antar wilayah serta perluasan pasar domestik dan internasional. Kualitas infrastruktur transportasi dapat dikatakan baik apabila mampu mengurangi efek jarak baik antar daerah maupun negara, mengintegrasikan pasar nasional ataupun dunia, serta mampu menghubungkan dengan biaya rendah (Novianti, 2013).

Prasarana transportasi disebut sebagai tulang punggung perkembangan suatu wilayah, sehingga penting dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada sarana dan prasarana di bidang transportasi bukan hanya dilihat dari adanya alat transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, akan tetapi juga pada pembangunan jembatan dengan tujuan memperpendek jarak tempuh warga agar lebih cepat dan efisien untuk sampai ditempat tujuan. Namun, dalam pembangunan jembatan tentu membawa dampak yang dihasilkan.

Pembangunan jembatan Suramadu misalnya, yang telah menjadi *Big Project* dalam pengembangan pemerataan ekonomi lokal pada wilayah Jawa

Timur dan Madura, juga memiliki dampak ekonomi yang nyata terhadap masyarakat di sekitar jembatan Suramadu. Dampak ekonomi yang signifikan terlihat pada perubahan masyarakat di sekitar pembangunan jembatan Suramadu yaitu keterbukaan lapangan pekerjaan, pola hidup yang konsumtif, aspek peningkatan pada pendapatan masyarakat serta peningkatan level kesejahteraan masyarakat (Mardiyono, dkk, 2012).

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan mobilitas dan perekonomian yang sangat pesat. Hal ini membuat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro berupaya membangun sarana dan prasarana transportasi yang mendukung dan memadai, sebagai tujuan memperlancar hubungan daerah satu dengan daerah yang lain di Bojonegoro.

Tabel 1.1 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jembatan kondisi baik	799	827	835	837	839
Jembatan kondisi rusak ringan	51	29	25	23	22
Jembatan kondisi rusak berat	21	15	15	15	14
Jumlah jembatan	871	871	875	875	875
Proporsi jembatan kondisi baik (%)	91,73	94,95	95,43	95,66	95,88
Proporsi jembatan kondisi sedang (%)	5,86	3,33	2,86	2,63	2,51
Proporsi jembatan kondisi rusak (%)	2,41	1,72	1,71	1,71	1,60

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012 yaitu 875 buah, terdiri dari jembatan kayu dan beton. Jembatan dengan kondisi baik pada tahun 2012 berjumlah 839 buah mengalami peningkatan sebesar 4,76% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 799 buah. Jumlah jembatan dengan kondisi rusak ringan tahun 2012 sejumlah 22 buah,

dibandingkan dengan 2008 dengan jumlah 51 buah serta jembatan dengan kondisi rusak berat juga mengalami penurunan dari 21 buah pada tahun 2008 menjadi 14 buah pada tahun 2012. Hal ini dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jembatan di Kabupaten Bojonegoro cukup berhasil dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2008 hingga 2012. Meskipun pembangunan jembatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, pembangunan tersebut hanya berhenti pada evaluasi capaian kegiatan bahwa pembangunan jembatan di Kabupaten Bojonegoro telah berhasil dilaksanakan tanpa melihat seberapa besar efektivitas dari pembangunan jembatan tersebut.

Menurut Sutopo (2012) selain mampu mengukur dari kegiatan pembangunan infrastruktur disuatu wilayah, diperlukan pula suatu model ataupun metoda yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur efektivitas dari suatu kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini untuk mengetahui bahwa evaluasi kinerja pembangunan benar-benar dapat memberikan informasi dan manfaat yang komprehensif, dan yang paling penting adalah dapat dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Khususnya pembangunan di bidang infrastruktur wilayah yang pada umumnya memiliki nilai kuantitas dan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat dan dunia usaha.

Kenaikan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, akan berpengaruh terhadap kenaikan output yaitu PDRB di suatu wilayah. Apabila pada kenyataannya terdapat pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur di suatu daerah, akan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan PDRB yang lebih besar, maka kinerja infrastruktur di daerah tersebut dapat dikatakan *“tidak efektif”*

sekali pun penyelesaian kegiatan infrastruktur tersebut termasuk dalam kategori sesuai perencanaan atau *on the tract* (Sutopo, 2012). Dalam mengukur ke-efektifan dari kinerja pembangunan infrastruktur transportasi seperti pada pembangunan jembatan yaitu apabila dapat memberikan kontribusi terhadap besarnya PDRB secara memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2015) menjelaskan bahwa konsep pembangunan yang efektif tidak lepas dari partisipasi dan kelembagaan pada masyarakat. Partisipasi dalam hal ini adalah melibatkan peran serta dari masyarakat yang secara langsung sejak awal proses perencanaan pembangunan hingga perumusan dari pencapaian hasil. Adapun kelembagaan yang dimaksud dalam perspektif pembangunan yaitu, kelembagaan yang dianggap sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi sosial, memfasilitasi dari kegiatan belajar, bahkan sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi.

Pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Padangan dan Kecamatan Kasiman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, direncanakan sejak tahun 2007, sedangkan pelaksanaan pembangunannya dimulai tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015 (Roqib, 2012). Dengan tujuan untuk memperpendek jarak tempuh warga di utara Bengawan Solo dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena sebelum dibangunnya jembatan tersebut warga di Kecamatan Kasiman dan Kedewan yang berada di utara Bengawan Solo harus berputar dahulu melalui Cepu, Jawa Tengah jika ingin ke Bojonegoro (Kristianto, 2015).

Kecamatan Padangan dan Kecamatan Kasiman sebagai titik penghubung kecamatan yang lain di Kabupaten Bojonegoro, namun kedua kecamatan ini

terpisah oleh sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, pembangunan jembatan sangat diperlukan masyarakat yang berada di Kecamatan Padangan dan Kecamatan Kasiman, bukan hanya mempermudah pengguna jalan namun juga mendukung mobilitas dan perekonomian daerah Bojonegoro. Pengadaan barang publik terkait infrastruktur transportasi yaitu pembangunan infrastruktur jembatan di Kecamatan Padangan dan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro memiliki peran besar terhadap pengembangan ruang di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta sebagai tulang punggung dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro menarik untuk diteliti, yakni dengan melihat seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari pembangunan jembatan tersebut dalam mencapai efisiensi oleh pengguna rutin jalan menuju antar daerah disekitar Kecamatan Padangan dan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro meliputi jarak, waktu dan energi yang dikeluarkan setiap harinya.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN JEMBATAN PADANGAN-KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas dari hasil pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro bagi pengguna rutin jalan yang meliputi jarak, waktu dan energi yang dikeluarkan setiap harinya?

2. Seberapa besar tingkat efektivitas dari hasil pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro bagi warga sekitar dalam mencapai aksesibilitas ke fasilitas publik?
3. Seberapa besar penghematan biaya BBM bagi pengguna jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro?
4. Seberapa besar nilai investasi dari pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fokus penelitian. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari hasil pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro bagi pengguna rutin jalan yang meliputi jarak, waktu dan energi yang dikeluarkan setiap harinya.
2. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari hasil pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro bagi warga sekitar dalam mencapai aksesibilitas ke fasilitas publik.
3. Mengetahui seberapa besar penghematan biaya BBM bagi pengguna jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
4. Mengetahui seberapa besar nilai investasi dari pembangunan jembatan Padangan-Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ekonomi pembangunan yaitu berupa efektifitas dan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur jembatan. Selain itu, juga dapat menambah informasi bagi peneliti lain yang merasa tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang tingkat efektifitas dan dampak ekonomi dari pembangunan jembatan bagi masyarakat sekitar proyek dan pengguna jembatan tersebut.